



COMMUNITY:

Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Journal website: <https://community.pdtii.org>

Vol. 5, No. 1, (2026)

DOI: <https://doi.org/10.61166/community.v5i1.174>

E-ISSN : 2964-5557

pp. 695-713

Article

Respon Masyarakat Kampung Cipari Kabupaten Garut Terhadap Pemberontakan DI/TII Tahun 1949-1962

Ghaitsa Ramdani¹, Ading Kusdiana², Yasmina Wikan Astri³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; ghaitsarhamdani@gmail.com

2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; adingkusdiana@uinsgd.ac.id

3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia;

Yasminawikan.Astri@uinsgd.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Community Journal. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 10, 2026

Revised : March 02, 2026

Accepted : April 06, 2026

Available online : May 27, 2026

How to Cite: Ghaita Ramdani, Ading Kusdiana, & Yasmina Wikan Astri. (2026). The Response of the Cipari Village Community, Garut Regency, to the DI/TII Rebellion 1949-1962. *Community: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 695–713. <https://doi.org/10.61166/community.v5i1.174>

The Response of the Cipari Village Community, Garut Regency, to the DI/TII Rebellion 1949-1962

Abstract. This research discusses the response of the people of Cipari Village, Garut Regency, to the Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) rebellion during the period 1949-1962. The main focus is the role of the Cipari Islamic Boarding School led by K.H. Yusuf Tausiri in countering DI/TII ideological extremism while maintaining moderate Islamic values and loyalty to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This research uses a historical method that includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through interviews, archival documents, and literature review. The results revealed the importance of the role of pesantren as agents of socio-political change in Indonesia. As a traditional institution, pesantren not only maintain religious values, but also become a moral and social fortress capable of facing the threat of ideological extremism. Cipari Islamic boarding school shows an important contribution in maintaining national integration and fighting separatist movements that threaten the integrity of the nation. K.H. Yusuf Tausiri played a strategic role by leading the Darussalam laskar and the people of Cipari Village to face more than 50 attacks by DI/TII troops. His approach to rejecting DI/TII extremism by emphasizing internal reform, preaching, and defensive resistance, made the Cipari Islamic Boarding School a symbol of strong ideological and physical resistance.

Key Words: DI/TII Rebellion, K.H. Yusuf Tausiri, Community Response.

Abstrak. Penelitian ini membahas respon masyarakat Kampung Cipari, Kabupaten Garut, terhadap pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) selama periode 1949-1962. Fokus utama adalah peran Pesantren Cipari yang dipimpin oleh K.H. Yusuf Tausiri dalam melawan ekstremisme ideologis DI/TII dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam moderat dan loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumen arsip, dan kajian literatur. Adapun hasil penelitian mengungkapkan pentingnya peran pesantren sebagai agen perubahan sosial-politik di Indonesia. Sebagai institusi tradisional, pesantren tidak hanya mempertahankan nilai-nilai agama, tetapi juga menjadi benteng moral dan sosial yang mampu menghadapi ancaman ekstremisme ideologi. Pesantren Cipari menunjukkan kontribusi penting dalam menjaga integrasi nasional dan melawan gerakan separatis yang mengancam keutuhan bangsa. K.H. Yusuf Tausiri berperan strategis dengan memimpin laskar Darussalam dan masyarakat Kampung Cipari menghadapi lebih dari 50 serangan pasukan DI/TII. Pendekatannya menolak ekstremisme DI/TII dengan menitikberatkan pada reformasi internal, dakwah, dan perlawanan defensif, menjadikan Pesantren Cipari simbol perlawanan ideologis dan fisik yang kokoh.

Kata Kunci: Pemberontakan DI/TII, K.H. Yusuf Tausiri, Respon Masyarakat.

PENDAHULUAN

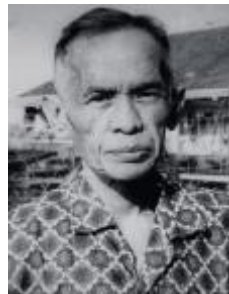
Indonesia memiliki sejarah kelam dalam menghadapi pemberontakan bersenjata yang melibatkan unsur agama dan etnis. Gerakan-gerakan ini sering kali dipicu oleh anggapan bahwa pemerintah yang sah gagal memperjuangkan nilai-nilai agama atau memberikan keadilan kepada kelompok etnis minoritas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik, di berbagai periode kepemimpinan negara. Akibatnya, pemberontakan tetap menjadi tantangan besar bagi keutuhan bangsa.

Beberapa contohnya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, serta gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII), yang hingga kini masih menjadi ancaman terhadap soliditas nasional. Di antara berbagai pemberontakan tersebut, gerakan yang berlandaskan agama (*religious rebellion*) tampaknya menjadi persoalan yang paling kritis. Salah satu contohnya adalah evolusi atau metamorfosis gerakan Darul Islam (Zada, 2017).

Gerakan Darul Islam bermula setelah Perjanjian *Renville* pada 19 Agustus 1948, yang ditolak oleh Kartosuwiryo. Penolakannya mendorongnya untuk mundur ke gunung dan melanjutkan perjuangan yang ia sebut sebagai jihad. Sikap nonkooperatif Kartosuwiryo membuat Islam menjadi elemen penting dalam pemberontakan ini. Pada akhirnya, ia mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat, yang kemudian menyebar ke daerah lain seperti Jawa, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

Dalam perkembangannya, meski Indonesia telah melewati berbagai fase transisi kekuasaan hingga era reformasi, gerakan Darul Islam kini tidak lagi memiliki satu bentuk tunggal. Kelompok ini telah menyusup ke berbagai bidang, termasuk partai politik, organisasi Islam, dan institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren (Zada, 2017).

Gambar 1. Kartosuwiryo



Sumber: Biografiku.com.

Pesantren memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, pesantren berhasil melahirkan tokoh-tokoh yang turut berperan pada masa awal kemerdekaan, termasuk dalam perumusan konstitusi negara. Selain itu, para ulama dan santri menjadi garda terdepan dalam melawan penjajahan, dengan semangat jihad yang berlandaskan pembelaan terhadap agama dan tanah air. Setelah kemerdekaan, ulama dan santri dari berbagai pesantren di seluruh Indonesia terus berkontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan serta menjaga integrasi bangsa. Salah satu pesantren yang terlibat dalam dinamika sosial-politik tersebut adalah Pesantren Cipari di Kabupaten Garut.

Penelitian ini berfokus pada "Respon Masyarakat Kampung Cipari Kabupaten Garut terhadap Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat Tahun 1949-1962." Tujuan dari penelitian ini adalah mendokumentasikan keberadaan dan peran Pesantren Cipari selama kurun waktu tersebut secara kronologis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai sejarah pesantren di Indonesia.

Dalam kajiannya pada tahun 1982, Hiroko Horikoshi menyoroti peran Ajengan Yusuf Tauziri dari Pesantren Cipari. Ia membantah pandangan Geertz yang menyebut kiai berperan pasif. Sebaliknya, Horikoshi menunjukkan bahwa kiai berperan aktif dalam memilih dan mengarahkan nilai-nilai serta sikap positif yang perlu dikembangkan masyarakat. Para kiai juga menetapkan prioritas perubahan sosial, memimpin transformasi masyarakat, dan tetap mempertahankan nilai-nilai agama. Meskipun nilai agama tidak berubah, perilaku politik masyarakat mengalami perubahan signifikan di bawah bimbingan kiai desa.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Suparta dalam (Imadudin, 2017) memperluas pemahaman ini dengan menunjukkan perbedaan pendekatan dibandingkan penelitian sebelumnya oleh Horikoshi dan Manfred Ziemek. Suparta menyoroti bahwa baik Horikoshi maupun Ziemek tidak mengaitkan perubahan internal pesantren dengan dinamika eksternal masyarakat. Suparta menekankan hubungan antara kedua aspek tersebut, terutama dalam hal perubahan orientasi pesantren yang mencerminkan pemahaman keagamaan tertentu.

Interaksi antara tokoh-tokoh pesantren dan lingkungan sekitarnya dipengaruhi oleh semangat zaman atau *zeitgeist*. Pendekatan *deterministik idealistik* ini digunakan untuk menganalisis sejarah jangka panjang, di mana pikiran dan tindakan para pelaku sejarah terkait erat dengan konteks zamannya. Konsep *sensibility* yang diperkenalkan oleh Kuntowijoyo membantu menjelaskan dimensi emosional yang memengaruhi periode sejarah tertentu (Imadudin, 2017).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang peran pesantren sebagai lembaga tradisional yang berkontribusi dalam perubahan sosial, politik, dan budaya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian Sejarah Respon Masyarakat Kampung Cipari Kabupaten Garut terhadap Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat pada tahun 1949-1962 ini, peneliti menerapkan metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan pertama adalah pengumpulan sumber yang dikenal sebagai heuristik. Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan sumber-sumber yang relevan yang berkaitan dengan Pemberontakan DI/TII di Garut Jawa Barat. Setelah proses heuristik selesai, peneliti melanjutkan dengan tahap kritik. Kritik dibagi menjadi dua jenis, yaitu kritik internal dan eksternal. Setelah sumber-sumber yang diperoleh dikritik, peneliti harus

mengkolaborasikan sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan fakta sejarah yang mendekati kebenaran. Tahapan ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi, di mana fakta-fakta yang telah dikumpulkan dirangkai menjadi suatu urutan yang berkesinambungan dari peristiwa. Peneliti melakukan analisis dan sintesis dari data yang diperoleh, sehingga membentuk gambaran utuh dari peristiwa yang diteliti. Tahapan terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil penelitian dengan bahasa yang tepat agar mudah dipahami, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari proses heuristik dan kritik yang telah dilakukan sebelumnya (Kuntowijoyo, 2018).

PEMBAHASAN

Latar Belakangnya Terbentuknya NII (DI/TII) Di Garut Jawa Barat

Ada pendapat yang menyatakan bahwa "tidak ada Negara Islam" atau "Islam bukan sebuah negara." Ada pula yang mengatakan, "Tuhan tidak memerintahkan kita untuk mendirikan Negara Islam," serta pandangan yang beranggapan bahwa "tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang mewajibkan pembentukan Negara Islam." Pernyataan-pernyataan semacam ini adalah upaya untuk mengaburkan kebenaran agama Allah, seolah-olah Islam tidak mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Pandangan ini menggambarkan seolah politik tidak relevan dengan Islam. Berbagai upaya dilakukan untuk menghapuskan keberadaan Daulah Islamiyah dari dunia. Fenomena ini sering kali dilakukan oleh para elit penguasa atau kaum intelektual yang tidak peka, tidak peduli, dan tidak menyadari realitas sosial di Indonesia saat ini. Mereka gagal melihat penderitaan umat Islam di berbagai belahan dunia sebagai peringatan penting akan perlunya perubahan ideologi negara ini menjadi ideologi Islam (Sarina, 2018).

Semenjak tahun 1923, dia sudah aktif dalam gerakan kepemudaan, diantaranya gerakan pemuda Jong Java. Kemudian pada tahun 1925, Ketika anggota-anggota Jong Java yang lebih mengutamakan cita-cita keislaman-nya mendirikan Jong Islamieten Bond (JIB). Kartosoewirjo pun pindah ke organisasi ini karena sikap pemihakannya kepada agamanya. Melalui dua organisasi inilah kemudian membawa dia menjadi salah satu pelaku sejarah gerakan pemuda yang sangat terkenal, "Sumpah Pemuda" (Chaidar, 2008).

Pada tahun 1923, ia bergabung dengan Jong Islamieten Bond (Liga Pemuda Muslim), sebuah organisasi yang didirikan oleh Haji Agus Salim dan Wiwoho Purbohadijoyo, dengan Wiwoho sebagai ketua pertamanya. Pada tahun 1927, setelah dikeluarkan dari NIAS dan mengajar di Bojonegoro, Kartosuwiryo tinggal di rumah Haji Umar Said Tjokroaminoto, pemimpin terkenal Sarekat Islam. Tjokroaminoto, ketua Sarekat Islam memang selalu membuka pintu rumahnya untuk anak-anak muda yang tertarik pada pemikiran politiknya. Salah satunya adalah

Sekarmadji maridjan Kartosuwiryo, yang pindah ke Surabaya pada 1923 (Kartosoewirdjo, 2019).

Pada kongres Serikat Islam tahun 1929, nama Serikat Islam kemudian ditambah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Tujuan dari penambahan nama ini adalah untuk menyempurnakan perjuangan, yakni mencapai kemerdekaan nasional, bukan kemerdekaan yang hanya memihak di sebagian pulau Jawa. Kemudian selama lima bulan, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) menggabungkan diri dengan Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Penggabungan dua pergerakan ini ternyata berdampak buruk pada tubuh Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Karena di dalam tubuh perserikatan ini mempunyai cara pandang yang berbeda-beda, akhirnya PSII pecah menjadi beberapa kubu, di antaranya kubu PSII pimpinan Sukiman, PSII pimpinan Abikusno, PSII pimpinan sendiri, dan PSII pimpinan Kartosoewirjo (Hadiwijoyo, 2013).

Ketika Kartosuwiryo pindah ke Malangbong pada tahun 1929, ia ditunjuk sebagai wakil PSII untuk Jawa Barat. Dengan dedikasi dan kerja kerasnya, ia berhasil memperluas pengaruh PSII di wilayah tersebut. Pada tahun 1931, ia terpilih sebagai sekretaris umum PSII, dan pada tahun 1936 menjadi wakil ketua. Namun, ia akhirnya meninggalkan PSII karena konflik internal yang semakin memanas, terutama terkait sikap terhadap pemerintah colonial.

Pada awal maret berlangsung suatu konsperensi penting yang kedua kalinya ini di Cipeundeuy, sebuah desa di selatan Malangbong. Disini dikukuhkan Keputusan-keputusan yang telah dicapai di Pangwedusan, sedangkan selanjutnya ditekankan perlunya bersiap menciptakan suatu negara Islam. Hal ini dianggap perlu agar siap siaga sekiranya Belanda melanjutkan rencananya menciptakan Negara Pasundan yang merdeka di Jawa Barat, atau bila pemerintahan Republik harus bubar. Salah satu keputusan yang diambil dalam konferensi ini adalah penggabungan pasukan Hizbullah dan Sabilillah menjadi Tentara Islam Indonesia serta pembentukan Divisi Tentara Islam Indonesia. Keputusan selanjutnya adalah Hizbullah Cirebon digabungkan menjadi Tentara Islam Indonesia dan Kamran diangkat sebagai Panglima Divisi Tentara Islam Indonesia (Pramitha, 2017).

Pada masa itu pihak Belanda telah mendirikan Negara Pasundan lengkap dengan alat-alat kekuasaannya, seperti Veiligheids Batalyon (VB). Seperti biasanya Belanda dengan para pengikutnya melakukan macam-macam taktik, misalnya bujuk dan rayu atau gertak. Hal sedemikianpun dilakukan oleh Belanda dkk, terhadap pasukan pasukan gerilya kita untuk bergabung dengan mereka, dengan janji-janji yang muluk-muluk.

Dengan terbentuknya "Negara Pasundan" itu, S.M Kartosuwiryo memanfaatkan suasana guna mewujudkan ambisi cita-citanya dan keadaan di Jawa Barat dijadikan alasan untuk mendirikan suatu negara Islam (Darul Islam). Dalam

menjalankan maksudnya itu, S.M Kartosuwiryo bukan saja membujuk akan tetapi memaksa pasukan gerilya lainnya agar bergabung dibawah pimpinannya (A, 1978).

Negara Islam sendiri belum terbentuk. Hanya ditekankan pada suatu hari, bila pemerintahan Republik digulingkan Belanda dan tidak ada atau pun kehilangan legitimasinya, negara yang demikian mungkin menjadi kenyataan. Hiroko Horikoshi mengemukakan suatu negara Islam belumlah dibentuk karena tantangan dari pemimpin-pemimpin griliya yang hadir, yang mengatakan "Ide untuk mendirikan Negara Islam, melenyapkan Republik kesatuan adalah diluar apa yang hendak diusahakan sebagian besar kelompok dibawah pengaruh Kiyai Yusuf (Tauziri). Ketidaksepakatan idiologi ini sebagian diselesaikan Hizbu'llah dan Sabili'llah daerah, dan badan badan liar bukan Islam seperti pesindo dari Cirebon yang kembali ke daerah masing-masing untuk memusatkan diri pada usaha-usaha setempat melawan Belanda, sementara mengadakan hubungan lepas dengan DI sebagai semacam badan koordinasi perlawanan. Pada waktu TII terbentuk hanya satu kelompok Hizbu'llah, kelompok tasikmalaya yang dipimpin Oni (kemudian menjadi perdana mentri DI), tetap bersama Kartosuwiryo" (Hiroko, 1975).

Tetapi tekad Kartosuwiryo bersama pendukung negara Islamnya pun belum bulat. Mereka kuat menghendaki struktur pemerintah Islam. Mereka menentang Pemerintahan Republik, tetapi masih ragu memproklamasikan suatu negara jenis ini yang meliputi seluruh bekas Hindia Belanda dulu. Lalu mereka membentuk sebuah pemerintahan sementara untuk Jawa Barat, yang sesungguhnya memiliki banyak ciri suatu negara merdeka. Namun mereka tidak secara resmi menentang Republik selama kira-kira satu tahun berikutnya. Dalam teori, Tindakan-tindakan mereka semata-mata direncanakan untuk menghadapi pembentukan negara pasundan, dan bukan Republik, yang merupakan musuh-musuh nyata Tentara Islam Indonesia.

Walaupun tidak di ucapkan secara terang-terangan, cita-cita suatu negara Islam Indonesia tidak pernah lenyap dari pikiran mereka Struktur militer dan pemerintahan yang disusun Kartosuwiryo dan Oni, yang secara resmi terbatas pada Jawa Barat, jelas dimaksudkan sebagai pemerintahan bayangan, yang akan berfungsi jika pemerintahan Republik kalah melawan Belanda. Mengenai konsep Negara DI, ia membagi wilayahnya dalam beberapa daerah yang terdiri dari Daerah 1 (Daerah ibu kota negara) yang di lengkapi aparat pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Daerah II merupakan wilayah negara meliputi Jawa Barat. Daerah III adalah wilyah yang dimana penduduknya telah menjadi pengikut DI (Pramono, 1983).

Terdapat berbagai penafsiran yang berbeda mengenai makna singkat ini, khususnya kependekan DI. Salah satu penafsiran adalah DI yang berarti Darul Islam, atau wilayah Islam, namun makna ini mungkin baru muncul belakangan. Alers meyakini bahwa DI pada walnya berarti Daerah Satu, yang ditafsirkannya sebagai "negara kesatuan", dengan menyatakan: "Makna yang sebenarnya, yaitu dar al Islam,

tidak dikenal secara luas. Baru kemudian Kartosuwiryo mengubahnya menjadi (D)arul (I)slam. Pinardi membantah bahwa Daerah Satu harus diartikan sebagai "negara kesatuan", dengan menyatakan bahwa artinya adalah "daerah kesatu", daerah induk Islam, yang akan menjadi wilayah dimana hukum Islam dan kekuasaan Islam sepenuhnya diterapkan". Daerah kedua dan ketiga masing-masing berarti "daerah yang hanya sebagian didominasi oleh Masyarakat Islam" dan daerah-daerah yang belum dikuasai oleh Masyarakat Islam".

Namun, orang tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahwa pembagian wilayah negara Islam menjadi tiga daerah yang berbeda memiliki makna yang lebih dalam. Para pengamat negara Islam, saat membentuk daerah pertama, kedua, dan ketiga, mungkin membayangkan suatu pembagian di masa depan dari seluruh wilayah Indonesia ke dalam jenis-jenis daerah komando militer. Mereka mungkin membayangkan pembagian wilayah serupa dengan pembagian wilayah Tentara Indonesia, yaitu dengan membagi Indonesia ke dalam daerah-daerah komando yang juga ditandai dengan angka-angka Romawi. Ketika para pemberontak Aceh menyatakan bergabung dalam gerakan Darul Islam setidaknya dalam nama panglima mereka, Daud Beureueh, yang menamakan dirinya panglima Divisi Wilayah Kelima (V) Tentara Islam Indonesia (Dijk, 1995).

Perselisihan utama terjadi antara pihak yang mendukung kerja sama dengan kolonial, seperti Agus Salim, dan pihak yang mendukung sikap nonkooperasi mutlak, seperti Kartosuwiryo dan Abikusno Tjokrosujoso. Kartosuwiryo, yang mendukung prinsip nonkooperasi tanpa kompromi dan konsep hijrah, semakin tidak sejalan dengan arah partai. Pada kongres ke-20 PSII tahun 1936, Kartosuwiryo diangkat menjadi wakil ketua, tetapi konflik internal terus memburuk. Pada 30 Januari 1939, Kartosuwiryo dan beberapa tokoh lainnya, termasuk Kiai Jusuf Tauziri dan Kamran, dikeluarkan dari PSII.

Setelah itu, Kartosuwiryo mendirikan Komite Pertahanan Kebenaran PSII (KPK-PSII) sebagai upaya untuk melanjutkan perjuangan PSII yang dianggap sejati. KPK-PSII berkembang pesat, dari hanya dua cabang pada awalnya menjadi 21 cabang pada Maret 1940. Kartosuwiryo kembali ke panggung politik setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai perwakilan dari Masyumi. Pada sidang kelima KNIP di Malang tahun 1947, ia ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Eksekutif.

Meski sempat menahan diri untuk menentang kekuasaan Republik secara terbuka antara 1948-1949, Kartosuwiryo menguatkan struktur politik organisasinya melalui konferensi di Cijoho pada 1 Mei 1949. Di konferensi tersebut, ia merancang konstitusi yang dikenal sebagai Kanun Azasy, membentuk Dewan Kabinet atau Dewan Imamah, serta Dewan Fatwa. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Cisampang, Cisayong, Jawa Barat.

Menurut Kanun Azasy, NII adalah karunia Ilahi yang menjamin penerapan syariat Islam bagi masyarakat Muslim, serta kebebasan beribadah bagi pemeluk agama lain. Islam dijadikan dasar hukum negara, dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum tertinggi. Kepala negara, yang disebut Imam, haruslah seorang Muslim pribumi yang bertakwa. Sistem pemerintahan NII berbentuk republik, dengan lembaga-lembaga konstitusional seperti Majelis Syuro (parlemen), Dewan Syuro (legislatif), dan Dewan Fatwa (penasihat).

Gambar 2. Buku Pedoman Dharma Bakti Darul Islam S.M Kartosoewirjo



Sumber: Koleksi Museum Mandalawangsit.

Kartosuwiryo menjadikan Islam sebagai ideologi politik, yang menurutnya harus menjadi landasan setiap perjuangan politik. Ia berpendapat bahwa negara Islam harus memiliki kedaulatan penuh, baik secara de facto maupun de jure, tanpa pengaruh atau ketergantungan pada pihak lain. Kartosuwiryo mengkritik Pancasila karena dianggap tidak berakar kuat di hati rakyat dan terlalu bergantung pada dukungan internasional. Sebaliknya, ia menganggap Islam sebagai dasar negara yang lebih sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia (Ridlo, 2019).

Dalam pertemuan tersebut, Kartosuwiryo menyampaikan pidatonya yang berjudul "Haluan Politik Islam." Pada tahun 1946, ia merancang rencana untuk menyerang markas Divisi Siliwangi yang saat itu berlokasi di Malangbong. Tindakan ini memicu Panglima Divisi Siliwangi, A.H. Nasution, mengeluarkan perintah untuk menangkap Kartosuwiryo. Meskipun ia sempat ditangkap, Kartosuwiryo dibebaskan 10 hari kemudian. Puncak dari seluruh perjuangan dan usaha Kartosuwiryo adalah proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949. Berikut ini adalah latar belakang dan kronologi peristiwa yang mengawali kelahiran NII (Firmansyah, 2016).

Konflik antara Darussalam dan DI/TII dapat ditelusuri melalui perbedaan pendekatan perjuangan antara K.H. Yusuf Taziri dan S.M. Kartosuwirjo. Perbedaan ini mencakup pandangan terhadap "kerja sama" dengan penjajah, konsep Negara

Islam, dan sikap politik terhadap Perjanjian Renville. S.M. Kartosuwirjo mengambil langkah tegas terhadap penjajah, sementara K.H. Yusuf Tausiri lebih strategis dengan memanfaatkan keahlian lawan untuk melemahkan mereka. Taktik kooperasi dan non-kooperasi digunakan bergantian sesuai kebutuhan.

Salah satu contoh taktik K.H. Yusuf Tausiri adalah usulannya kepada Kolonel De Jong, penguasa militer di Garut, agar pemuda Darussalam dilatih militer untuk membantu Belanda melawan DI/TII. Usulan ini disetujui, dan pelatihan berlangsung hingga 1949. Para pemuda yang mengikuti pelatihan ini sebenarnya adalah anggota laskar Darussalam dan TNI, sehingga pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan mereka. Akibatnya, TNI yang kembali dari Long March melewati wilayah di bawah pengaruh Darussalam tidak mengalami gangguan berarti. Namun, bagi DI/TII, tindakan ini dianggap sebagai deklarasi perang, yang ditanggapi dengan serangan dan ejekan bernada kebencian, seperti "mentega dari Wihelmina," yang mengacu pada kedekatan Darussalam dengan Belanda (Firmansyah, 2016).

Mengenai konsep Negara Islam, S.M. Kartosuwirjo mengadopsi pandangan yang tegas. Baginya, Negara Islam adalah realitas sejarah sekaligus kewajiban normatif, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Menurutnya, Negara Islam adalah sarana untuk menerapkan syariat, dan selain itu hanya ada "Negara Thogut," yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sebaliknya, K.H. Yusuf Tausiri lebih fokus pada dakwah untuk mengislamkan masyarakat daripada mendirikan Negara Islam. Dalam pandangannya, memperbaiki bagian yang rusak dalam suatu sistem lebih baik daripada menghancurkannya secara keseluruhan. Ia secara intens mempelajari Undang-Undang Dasar DI dan menyimpulkan bahwa perjuangan DI/TII tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya. K.H. Yusuf Tausiri juga diskusi dengan ulama lain seperti Haji Ahmad Sanusi memperkuat pandangannya bahwa perjuangan DI tidak layak didukung oleh umat Islam. Oleh karena itu, K.H. Yusuf menolak ajakan Kartosuwirjo untuk mendukung proklamasi Negara Islam Indonesia (NII), termasuk permintaan Kartosuwirjo pada 15 Agustus 1945 (Akub, 2024).

K.H. Yusuf Tausiri muda berkembang menjadi salah satu ulama karismatik dari Garut. Pendidikan awal K.H. Yusuf Tausiri diperoleh dari pamannya, K.H. Ba'ali, yang merupakan pemimpin pesantren Cilame. Ia juga diketahui pernah belajar kepada K.H. Sanusi dari Sukabumi, yang terkenal sering berselisih dengan pemerintah Kolonial. Kemudian, K.H. Yusuf Tausiri melanjutkan pendidikannya ke Cirebon, Buntet, Uyublek, Leles, dan Suralaya. Pengalaman ini mendorong K.H. Yusuf Tausiri untuk tumbuh menjadi ulama yang memiliki semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang mendalam (Irfan Ahmad Fauzi, 2023).

Gambar 3. KH. Yusuf Tausiri



Sumber: Merdeka.com.

Kyai Yusuf Tausiri pernah mendapat ajakan dari Kartosuwiryo untuk turut serta mengumumkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI). Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Kyai Yusuf Tausiri dengan cara yang baik. Ia berpendapat bahwa mendirikan Negara Islam Indonesia dengan meninggalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah langkah yang terlalu ekstrem. Meski begitu, di awal hubungan mereka, Kyai Yusuf Tausiri dan Kartosuwiryo memiliki kedekatan yang erat dan hubungan yang sangat baik. Namun, seiring waktu, perbedaan pandangan ideologis dan politik antara keduanya membuat hubungan tersebut merenggang (Kusdiana, 2014).

Meskipun K.H. Yusuf Tausiri juga tidak setuju dengan hasil Perjanjian Renville yang mempersempit wilayah RI, ia menyikapinya dengan loyalitas terhadap pemimpin bangsa. Ia membagi laskar Darussalam menjadi dua, sebagian bergabung dengan Batalyon Husinsyah di Yogyakarta, termasuk putranya, Saep Darmawan, dan sebagian lagi tetap bertahan di kantong-kantong perlawanan di bawah komandonya. Bersama Hizbu'llah dan Sabili'llah, laskar Darussalam melanjutkan perlawanan terhadap Belanda dengan basis di Gunung Cupu, Ciamis.

Di sisi lain, S.M. Kartosuwirjo dengan tegas menolak Perjanjian Renville. Ia mempertahankan pasukan Hizbu'llah dan Sabili'llah yang berjumlah 4.000 orang di Jawa Barat, sembari menunggu momen untuk memproklamasikan NII. Momen ini tiba ketika Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah dan Negara Pasundan didirikan di Jawa Barat. Konflik semakin memuncak setelah Maklumat Komandan Tertinggi APNII No. 4 dan 5 yang mewajibkan peleburan semua pasukan ke dalam Tentara Islam Indonesia (TII) dan melarang partai serta organisasi lainnya. Kebijakan ini menimbulkan gesekan di antara kekuatan Islam.

K.H. Yusuf Tausiri menolak keras cara-cara DI/TII yang memaksa rakyat membayar pajak (infaq), karena hal ini menambah penderitaan mereka. Menurutnya, niat baik tidak dapat dibenarkan jika dilaksanakan dengan cara yang salah. Kartosuwirjo bahkan menyebut ulama yang menentanginya sebagai "ulama bughot" atau pembangkang, menandakan perbedaan yang mendalam antara keduanya.

Respon Masyarakat Kampung Cipari terhadap Pemberontakan DI/TII Di Jawa Barat Tahun 1949/1962

**Gambar 4. Persetujuan
Renville**



Gambar 5. Pasukan



Sumber: Koleksi Museum Mandalawangsit.

**Gambar 6. Pasukan
Siliwangi disambut oleh
Wakil Presiden Mohammad**



Sumber: Koleksi Museum Mandalawangsit.

Setelah Agresi Militer Belanda II, S.M. Kartosuwirjo mengklaim Jawa Barat sebagai wilayah de facto Negara Islam Indonesia (NII). Klaim ini memicu konflik fisik ketika Divisi Siliwangi dan badan-badan perjuangan kembali ke wilayah tersebut. Bagi Kartosuwirjo, kehadiran pasukan-pasukan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap otoritas NII. Sepanjang tahun 1949, permusuhan antara TNI (termasuk laskar Darussalam) dan DI/TII semakin intensif, berlangsung selama hampir enam bulan (Imadudin, 2017). Di Garut, pasukan DI memusatkan kekuatannya di daerah-daerah pedalaman seperti Gunung Guntur, Leles, Balubur Limbangan, Cibat, Malangbong, dan sekitar Gunung Cikuray. Wilayah ini disebut sebagai "daerah suffah" oleh gerilyawan DI, yang mereka anggap sebagai kawasan suci yang telah bersih dari musuh. Daerah-daerah tersebut menjadi basis serangan terhadap wilayah Garut.

Salah satu peristiwa penting adalah kontak senjata di Antralina, Malangbong, Garut, pada 25 Januari 1949, yang dikenal sebagai Peristiwa Antralina. Dua hari kemudian, pada 27 Januari 1949, Kartosuwirjo mengirimkan ultimatum kepada pihak Pesantren Darussalam agar segera menentukan sikap, apakah mendukung DI atau RI. Surat tersebut disampaikan melalui utusannya, termasuk Jaja, Sanusi Parta, dan Toha Arsyad dari Ciawi. Utusan ini diajak berdiskusi oleh K.H. Yusuf Tauziri di rumah Hj. Muti'ah. Dalam pertemuan itu, K.H. Yusuf menyampaikan bahwa setiap perjuangan memiliki waktunya, dan perjuangan Kartosuwirjo belum waktunya untuk dilaksanakan. Permintaan Kartosuwirjo agar pasukan K.H. Yusuf diserahkan ke NII juga ditolak.

Gambar 7. Meriam 25 PDR 88/MM



Sumber: Koleksi Museum Mandalawangsit.

Masyarakat sekitar mulai menyadari ancaman yang mengintai. Penduduk desa mengungsi ke masjid dan madrasah Cipari setiap sore, membawa perlengkapan seadanya dan bermalam di sana, sebelum kembali ke rumah keesokan harinya. Pada 30 Januari 1949, pasukan Siliwangi di bawah komando Mayor Rivai tiba di Pesantren Cipari. Hal ini memperjelas posisi Pesantren Darussalam yang mendukung RI, membuat Kartosuwirjo semakin marah terhadap K.H. Yusuf Tauziri. Setelah pasukan Siliwangi meninggalkan Cipari, pasukan DI/TII menyerang kampung tersebut dengan tujuan menangkap K.H. Yusuf. Dalam serangan itu, sekitar 30 anggota laskar Darussalam ditangkap dan dipaksa menyatakan kesetiaan kepada DI, dengan ancaman hukuman mati bagi yang menolak.

Gambar 8. Senjata Perang



Sumber: Koleksi Museum Mandalawangsit.

Serangan terhadap Cipari terus terjadi selama tahun 1949 hingga 1958, dengan total sekitar 50 hingga 52 kali serangan menurut berbagai sumber. Salah satu serangan terbesar terjadi pada 17 April 1952. Hiroko Horikoshi menggambarkan pertempuran tersebut berlangsung hingga pukul tiga dini hari, melibatkan sekitar 3.000 pasukan DI/TII yang melakukan tiga kali serangan. Penyerangan dilakukan dari arah selatan, berbeda dari biasanya yang menyerang dari utara pada malam hari. Pasukan DI/TII mengepung Cipari sejak pukul 19.00, dan penduduk mengungsi ke madrasah dan masjid untuk berlindung (Kusdiana, 2014).

Gambar 1.9 Senjata Perlawanan Laskar Darussalam



Sumber: Koleksi Museum Mandalawangsit.

K.H. Yusuf Tauziri memimpin perlawanan bersama laskar Darussalam dengan senjata terbatas, termasuk tujuh senapan tua, pistol, dan granat tangan. Dari menara masjid, K.H. Yusuf melancarkan serangan menggunakan granat, sementara penduduk dan laskarnya bertahan. Serangan berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak mengalami korban jiwa. Pasukan DI/TII akhirnya mundur menjelang Subuh setelah gagal mencapai tujuan mereka.

Serangan besar lainnya terjadi pada 5 Agustus 1952, dengan sekitar 1.500 pasukan DI/TII menyerang Cipari dari tiga arah. Mereka dilengkapi senjata berat seperti bren, standgun, dan mortir. Meski sempat mendesak pasukan Darussalam, serangan itu berhasil dipatahkan. K.H. Yusuf Tauziri kembali memimpin perlawanan dari menara masjid yang strategis. Meskipun Cipari mengalami kerusakan parah dengan banyak rumah terbakar, serangan DI/TII tidak berhasil menghancurkan desa maupun pesantren.

Beberapa kali serangan terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar. Namun serangan DI/TII terhadap Pesantren Cipari semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya operasi ofensi TNI dalam menumpas pasukan DI/TII. Selain itu, kekuatan laskar Darussalam semakin kuat berkat dukungan dari batalyon setempat dan perwira Staf Militer (PSM). Pasukan Darussalam berperan dalam membantu TNI

menumpas gerakan DI/TII di Wanaraja pada Tahun 1954. Setelah itu merakapun turut andil dalam melemahkan kekuatan DI/TII di kampung Cinta Sukawening. Keterlibatan pasukan Darussalam operasi militer TNI sangatlah penting karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayah-wilayah yang menjadi target pembersihan dari pengaruh DI/TII.

Gambar 10. Ambulan oprasi militer Kodam III



Sumber: Koleksi Museum Mandalawangsit.

Operasi "Pagar Betis" secara bertahap melemahkan kekuatan DI/TII dari tahun 1958-1960-an. Satu persatu wilayah yang menjadi basis pertahanan DI berhasil di rebut. Puncaknya, gerakan DI/TII berhasil dihentikan setelah S.M Kartosuwiryo ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962 pukul 11:35 di Kawasan Gunung Geber, Priangan Tengah. Dalam operasi penangkapan tersebut, Kompi "C" Batalyon 328/Kujang II memainkan peran yang sangat penting.

Dalam Surat Kabar Suluh Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 1962 di kabarkan Mahkamah AD keadaan Perang untuk Djawa-Madura yang khusus mengadili "Imam NII Panglima tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia" Sukarmadji Maridjan Kartosuwirjo (57 th) sejak tanggal 14 Agustus dalam sidang pada hari Kamis di Aula MABAD telah menjatuhkan hukuman mati atas diri terdakwa. Keputusan ini ditetapkan sesuai dengan tuntutan hukuman yang diajukan oleh penuntut umum. Mendengar Keputusan yang dibacakan oleh Hukum Ketua Letkol CKH Sukana Be HK selama sejam itu, Kartosuwiryo tampak pucat, lemas dan agak gemetar ketika Hakim Ketua akhirnya dengan suara lugas memponis hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. K.H. Yusuf Taziri menjadi simbol keberanian masyarakat Cipari. Penduduk mengenang keberaniannya memimpin perlawanan, bahkan ada yang percaya bahwa ia memiliki kekuatan gaib. Peristiwa-peristiwa ini menciptakan trauma mendalam bagi penduduk, tetapi juga membangun rasa hormat dan kekaguman terhadap keteguhan K.H. Yusuf Taziri dan masyarakat Cipari dalam mempertahankan desanya.

Dampak Peristiwa Pemberontakan DI/TII di Kampung Cipari

Menjelang subuh, Pasukan D1/TII mundur ke arah pegunungan sebelah utara Kampung Cipari. Dapat dikatakan bahwa tujuan penyerangan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Hanya sekedar menciptakan ketakutan dan trauma di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang Cipari yang sebelumnya mengungsi kembali ke rumah masing-masing. Pagi hari mereka melihat puing-puing rumah yang habis terbakar. Beberapa saat kemudian datanglah rombongan Palang Merah Indonesia dari Garut membawa makanan dan pakaian. Pada sore hari itu juga Gubernur Jawa Barat Sanusi Hardjadinata tiba dari Bandung bersama Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Simatupang dari Jakarta. Mereka menyampaikan duka cita mendalam atas korban yang tewas sekaligus menunjukkan kekagumannya atas keberanian laskar dan penduduk Cipari. Dalam rombongan itu, ikut pula seorang dokter Jerman untuk merawat yang luka-luka.

Dalam pertempuran itu, empat pengawal pesantren dan tujuh penduduk Cipari tewas. Kiai Bustomi, kaka ipar yusuf, juga menjadi korban. Ia ditembak ketika hendak berlindung di masjid. Mereka menemukan lusinan mayat di sawah dan empang ikan. Bahkan air kolam di sekitar pesantren pun berwarna kemerahan (Dewanto, 2011)

Gambar 11. kompleks pemakaman pendiri kampung dan pesantren Cipari



Gambar 12. Tanda Pangkat Angkatan perang Negara Islam Indonesia



Sumber: Koleksi Pribadi. Mandalawangsit.

Sumber: Koleksi Museum

Pada hari-hari berikutnya, kehidupan berjalan normal kembali. Di balong (kolam ikan) dan sawah ditemukan sepuluh mayat pasukan DI/TII. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang mau memakan ikan dari balong tersebut. Demikian pula, dalam waktu yang cukup lama penduduk enggan untuk bersawah kembali. Mereka masih merasakan trauma akibat serangan itu. Bertahun-tahun lamanya penduduk

masih mengingat dengan jelas kejadian yang luar biasa tersebut, dan selalu menghubungkannya dengan K.H. Yusuf Tauziri. Misalnya, dari atas menara ia mampu melemparkan granat berpuluh-puluh meter jauhnya. Ia tidak tertembak padahal berdiri di menara yang dapat dengan mudah ditembak. Bahkan ada cerita, letusan pistolnya laksana suara brend. Penduduk percaya, kiai itu telah mencapai tingkat tertinggi dalam tasawuf, yaitu ma'rifat. Ia dianggap memiliki kekuatan gaib (Imadudin, 2017).

Gambar 13. Mesjid Cipari Monumen Sejarah



Sumber: Koleksi Pribadi.

Gambar 14. Kerusakan Gerbong kereta api oleh gerombolan DI-TII//Kartosuwiryo, Malangbong-Priangan Timur (1957)



Sumber: Koleksi Museum Mandalawangsit.

Pemberontakan DI/TII di Kampung Cipari dan sekitarnya membawa dampak Ekonomi yang signifikan. Kerusakan infrastuktur seperti jalan jembatan dan bangunan merupakan salah satu dampak yang paling terasa. Pemboman dan pertempuran menyebabkan infrastuktur tersebut rusak, menghambat aktivitas ekonomi. Kerusakan infrastuktur tersebut berdampak pada sektor pertanian dan peroduksi pangan menurun, menyebabkan kelangkaan dan inflasi. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat (Fuadz, 2024).

KESIMPULAN

Pemberontakan DI/TII yang terjadi di Kampung Cipari, Kabupaten Garut, antara tahun 1949–1962, memperlihatkan kompleksitas konflik ideologis dan sosial di tingkat lokal. Pesantren Cipari, di bawah kepemimpinan K.H. Yusuf Tausiri, memainkan peran strategis sebagai pusat perlawanan baik secara fisik maupun moral terhadap gerakan DI/TII. K.H. Yusuf Tausiri memilih pendekatan yang menolak ekstremisme DI/TII, lebih mengutamakan loyalitas terhadap NKRI, serta mempertahankan nilai-nilai Islam yang moderat. Respons masyarakat Cipari terhadap serangan berulang dari pasukan DI/TII menunjukkan solidaritas yang kuat dan keberanian luar biasa meskipun menghadapi trauma sosial yang mendalam. Perlawanan yang dipimpin oleh K.H. Yusuf Tausiri juga menciptakan narasi kepahlawanan yang tidak hanya menginspirasi penduduk lokal tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap upaya mempertahankan integrasi nasional. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya pesantren sebagai lembaga tradisional yang tidak hanya berperan dalam pendidikan agama tetapi juga menjadi agen perubahan sosial-politik dalam sejarah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, H. N. (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung : Angkasa Bandung.
- Chaidar, A. (2008). *Negara Islam Indonesia Antara Fitnah & Realita*. Jakarta: Madani Pres.
- Dewanto, N. (2011). *Kartosoewirjo Mimpi Negara Islam*. Jakarta : keputakaan Populer Gramedia .
- Dijk, C. V. (1995). *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Firmansyah, A. (2016). *Biografi singkat SM Kartosoewirjo*. Jakarta : Garasi .
- Hadiwijoyo, S. (2013). *Kahar Muzakar dan Kartosoewirjo*. Yogyakarta : Palapa .
- Hiroko, H. (1975). *The Dar-ul-Islam movement in West Java (1948-1975): an experince in the historical proses*. Jakarta : Coenell Universty .
- Kartosoewirdjo, S. M. (2019). *Haluan Politik Islam*. Bandung: Sega Arsi.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusdiana, A. (2014). *Sejarah Pesantren*. Bandung: Humaniora .
- Pramono. (1983). *Badan-badan Perjuangan*. Jakarta : Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah Abri .

Wawancara

- Akub. (2024, November Sabtu). Pemberontakan DI/TII di Kampung Cipari . (G. Ramdani, Interviewer)

Fuadz, N. (2024, Desember Sabtu). Respon Masyarakat Kampung Cipari terhadap Pemberontakan DI/TII . (G. Ramdani, Interviewer)

Artikel Jurnal:

Imadudin, L. (2017). "Peran Kiyai dan Pesantren Cipari Garut Menghadapi DI/TII". *Patanjala*, 49-50.

Irfan Ahmad Fauzi, R. H. (2023). "K.H Yusuf Tauziri: Kiai Nasionalis dari Cipari tahun 1934-1953". *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* , 137.

Pramitha, N. B. (2017). "Peran Kamran dalam Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat pada Tahun 1949-1951". *Jurnal Fkip Unila*, 9.

Ridlo, M. (2019). "Negara Islam dan Kartosuwiryo" . *Humanistika Jurnal Keislaman* , 18-23.

Sarina. (2018). "*Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo Studi Tentang Pembentukan Negara Islam Indonesia*". Makasar: Skripsi Universitas Awaludin Makasar.

Zada, K. (2017). "Politik Perlawanan Muslim Cipari Garut terhadap Radikalisme Gerakan Darul Islam". *Istiqra*, 298-299.